STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Muhammad Bintang Ramadhan Syah
NPP. 33.0811
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: bintangsyah594@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Meyke Jayanti Kinasih, S.Pd., M. Hum
Email: meyke@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study is motivated by the complexity of managing community organizations (Ormas) in Samarinda City, which consists of 133 organizations with diverse ideological, ethnic, and interest backgrounds. The National and Political Unity Agency (Bakesbangpol) of Samarinda City, as the authorized institution for Ormas development, faces various structural and operational challenges in carrying out its supervisory and development functions in accordance with Law No. 16 of 2017 concerning Community Organizations.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the strategies implemented by the National and Political Unity Agency of Samarinda City in conducting the development of community organizations.* ***Method:*** *This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The study applies the Strategic Management theory by Fred R. David (2011).* ***Result:*** *The results show that the Ormas development strategy implemented by Bakesbangpol Samarinda City has been relatively well-executed at the strategy formulation stage, indicated by the presence of a systematic vision, mission, objectives, targets, and performance indicators. However, at the implementation stage, the strategy is still constrained by limitations in human resources, budget, and infrastructure, resulting in uneven development intensity. Meanwhile, at the evaluation stage, the SWOT analysis reveals that institutional strengths have not been fully matched by operational capacity in the field, making the strategy largely adaptive and responsive to existing limitations.* ***Conclusion:*** *The Ormas development strategy of Bakesbangpol Samarinda City is not yet fully optimal. Strengthening human resource capacity, increasing budget allocation, optimizing infrastructure, and improving inter-agency coordination are required to ensure that Ormas development becomes more effective, measurable, and sustainable.*

Keywords: *Bakesbangpol, Community Organizations, Development, Strategy.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research gap*): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas pengelolaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Samarinda yang mencapai 133 organisasi dengan latar belakang ideologi, etnis, dan kepentingan yang beragam. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Samarinda sebagai instansi yang berwenang dalam pembinaan ormas menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural maupun operasional, dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam melaksanakan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Strategi menurut David (2011). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembinaan ormas oleh Bakesbangpol Kota Samarinda telah berjalan cukup baik pada aspek perumusan strategi yang ditandai dengan adanya visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang sistematis. Namun pada tahap implementasi, pelaksanaan strategi masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana yang menyebabkan intensitas pembinaan belum merata. Sementara pada tahap evaluasi, hasil analisis *SWOT* menunjukkan bahwa kekuatan kelembagaan belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas operasional di lapangan, sehingga strategi pembinaan masih bersifat adaptif dan responsif terhadap keterbatasan yang ada. **Kesimpulan:** Strategi pembinaan ormas oleh Bakesbangpol Kota Samarinda belum sepenuhnya optimal. Diperlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan alokasi anggaran, optimalisasi sarana prasarana, serta penguatan koordinasi lintas lembaga agar pembinaan ormas dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Badan Kesbangpol, Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan, Strategi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia karena berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya (Rahman et al., 2023). Keberadaan ormas tidak hanya menjadi saluran aspirasi publik, tetapi juga berperan dalam memperkuat demokrasi melalui pendidikan politik, advokasi kebijakan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Rusfiana & Kurniasih, 2024; Varda, 2011). Dalam konteks hukum nasional, eksistensi ormas diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian diperbarui melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Regulasi tersebut menegaskan bahwa ormas wajib berasaskan Pancasila, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ormas memiliki posisi strategis sekaligus

tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga stabilitas demokrasi dan integrasi nasional (Enjolras, 2009; Sénit, 2020).

Ormas pada dasarnya terbentuk dari keberagaman masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan kepentingan yang berbeda-beda (Bolleyer, 2021; Chowdhury et al., 2019). Keberagaman ini menjadikan ormas sebagai entitas sosial yang dinamis, namun juga memiliki potensi konflik apabila tidak dikelola secara baik. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengarahkan perilaku sosial-politik masyarakat agar tetap berada dalam koridor demokrasi Pancasila. Dalam praktiknya, ormas memiliki peran penting dalam penguatan demokrasi, khususnya melalui pendidikan politik, partisipasi dalam pengawasan kebijakan publik, serta keterlibatan dalam proses pemilu. Ormas juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, serta kontrol sosial terhadap kebijakan yang diimplementasikan di tingkat daerah.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan politik melalui fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap ormas. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Bakesbangpol bertugas melakukan fasilitasi pendaftaran ormas, pembinaan wawasan kebangsaan, mediasi konflik sosial, serta pengawasan terhadap aktivitas organisasi agar tidak menyimpang dari tujuan pendiriannya. Dengan demikian, Bakesbangpol tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra strategis ormas dalam menciptakan ketertiban, stabilitas, dan harmoni sosial di daerah. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembinaan ormas di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kepatuhan administratif sebagian ormas, seperti tidak melakukan pendaftaran resmi, tidak menyampaikan laporan kegiatan, serta tidak memperbarui data kelembagaan secara berkala. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan, karena data yang tidak valid menyulitkan pemerintah dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap aktivitas ormas. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara regulasi formal dengan implementasi di lapangan yang menyebabkan pembinaan tidak berjalan optimal.

Fenomena tersebut juga diperkuat oleh temuan Ramadhan (2024) yang menunjukkan bahwa sebagian besar ormas di beberapa daerah belum terdaftar secara resmi di Bakesbangpol, sehingga aktivitasnya tidak dapat diawasi secara maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus, ormas beroperasi tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat. Di sisi lain, penelitian Djuwita dan Hermawan (2018) mengungkapkan adanya penyalahgunaan AD/ART ormas di beberapa wilayah yang berdampak pada gangguan ketertiban umum. Sementara itu, Dewi et al. (2024) menyoroti keterbatasan instrumen hukum dan tidak seragamnya pelaksanaan kebijakan pengawasan di berbagai daerah, sehingga efektivitas pembinaan menjadi tidak konsisten.

Dalam konteks Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, dinamika keberadaan ormas menunjukkan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Berikut disajikan data terkait jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Samarinda sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Ormas di Kota Samarinda Menurut Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Ormas
Samarinda Utara	21
Samarinda Ulu	32
Samarinda Kota	7
Palaran	4
Samarinda Seberang	4
Loa Janan Ilir	9
Samarinda Ilir	10
Sungai Pinang	23
Sungai Kunjang	13
Sambutan	10
Kota Samarinda	**133**

Sumber: Bakesbangpol Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan data Bakesbangpol Kota Samarinda tahun 2025, jumlah ormas yang terdaftar mencapai 133 organisasi yang tersebar di 10 kecamatan. Distribusi tersebut menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yaitu Samarinda Ulu sebanyak 32 ormas, Sungai Pinang 23 ormas, Samarinda Utara 21 ormas, Samarinda Ilir 10 ormas, Sambutan 10 ormas, Loa Janan Ilir 9 ormas, Samarinda Kota 7 ormas, Palaran 4 ormas, serta Samarinda Seberang 4 ormas. Data ini menunjukkan bahwa terdapat konsentrasi ormas yang tinggi di wilayah perkotaan dengan karakteristik sosial yang lebih dinamis. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa total 133 ormas di Kota Samarinda mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial. Namun, tingginya jumlah tersebut tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan administratif yang optimal. Masih ditemukan ormas yang belum terdaftar secara resmi atau tidak memperbarui data kelembagaan secara berkala. Hal ini berdampak pada sulitnya pemerintah daerah dalam melakukan pendataan secara akurat dan melakukan pengawasan yang efektif. Selain itu, keberadaan ormas yang tidak terkontrol secara administratif berpotensi menimbulkan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk keterlibatan dalam konflik sosial maupun politik praktis.

Lebih lanjut, kondisi sosial di Kota Samarinda menunjukkan adanya beberapa kasus yang melibatkan oknum ormas, seperti bentrokan antar kelompok, tindakan intimidasi, serta dugaan praktik premanisme terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan pemberitaan media pada tahun 2025, terdapat sejumlah insiden pemalakan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan ormas, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan identitas organisasi. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mencederai citra ormas sebagai bagian dari masyarakat sipil yang seharusnya berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya Bakesbangpol, baik dari sisi jumlah personel maupun anggaran operasional, menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan pembinaan yang

berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh luasnya wilayah administrasi dan kompleksitas sosial masyarakat Kota Samarinda yang majemuk. Jumlah penduduk yang besar serta keberagaman latar belakang sosial-budaya menjadi potensi sekaligus tantangan dalam menjaga stabilitas daerah. Dalam situasi ini, fungsi pembinaan dan pengawasan ormas menjadi sangat krusial untuk mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas.

Berbagai data dan temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah ormas yang tinggi dengan efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Bakesbangpol. Di satu sisi, ormas memiliki kontribusi penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan demokrasi lokal. Namun di sisi lain, lemahnya kepatuhan administratif, keterbatasan pengawasan, serta munculnya kasus-kasus konflik sosial menunjukkan bahwa tata kelola ormas masih memerlukan penguatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dari Bakesbangpol dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan ormas agar dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan dinamika sosial di Kota Samarinda. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada tingginya jumlah ormas yang tidak sebanding dengan efektivitas pengawasan, rendahnya kepatuhan administratif, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan Bakesbangpol. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur secara lebih mendalam dan berbasis data empiris.

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (*Research Gap*)

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan kondisi faktual di Kota Samarinda. Secara regulatif, Bakesbangpol memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk melakukan fasilitasi pendaftaran, pembinaan wawasan kebangsaan, mediasi konflik sosial, serta pengawasan aktivitas ormas agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, pada tataran empiris, implementasi fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan data Bakesbangpol Kota Samarinda tahun 2025, terdapat 133 ormas yang tersebar di 10 kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi di Samarinda Ulu sebanyak 32 ormas, Sungai Pinang 23 ormas, dan Samarinda Utara 21 ormas. Meskipun jumlah ormas cukup besar, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi lapangan, seperti ormas yang belum terdaftar secara resmi, tidak memperbarui data kelembagaan, serta tidak menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya sistem pendataan dan pengawasan oleh Bakesbangpol. Selain itu, berbagai fenomena sosial di Kota Samarinda menunjukkan masih adanya kasus yang melibatkan oknum ormas, seperti bentrokan antar kelompok, tindakan intimidasi, hingga dugaan praktik premanisme terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan pemberitaan media tahun 2025, terdapat sejumlah kasus pemalakan yang dilakukan oleh individu yang mengatasnamakan ormas, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan identitas

organisasi dalam ruang sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan ormas yang cukup banyak belum sepenuhnya diimbangi dengan efektivitas pembinaan dan pengawasan yang kuat dari pemerintah daerah. Dengan demikian, terdapat paradoks antara tingginya jumlah ormas yang telah terdaftar dengan masih munculnya potensi gangguan ketertiban sosial di lapangan.

Penelitian mengenai pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) telah dilakukan di berbagai daerah dengan fokus yang beragam. Pohan dan Djohan (2023) meneliti pengawasan aktivitas ormas pemuda di Kabupaten Deli Serdang dan menemukan bahwa rendahnya kepatuhan administrasi organisasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan. Ramadhan dan Gumilar (2022) mengkaji strategi pembinaan ormas di Kabupaten Karawang yang menitikberatkan pada pendidikan wawasan kebangsaan dan pemberdayaan sumber daya manusia organisasi. Sementara itu, Ikhmatus (2025) menyoroti strategi pendidikan politik yang dilakukan Bakesbangpol Sidoarjo untuk meningkatkan partisipasi politik organisasi masyarakat. Penelitian Fachrurrozi et al. (2025) lebih berfokus pada peran Kesbangpol dalam penanganan konflik antarormas melalui pendekatan mediasi dan deteksi dini konflik.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan fungsi Bakesbangpol terhadap ormas, sebagian besar masih mengkaji pembinaan secara parsial, baik dari aspek pengawasan, pendidikan politik, pemberdayaan, maupun penanganan konflik. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaji pembinaan ormas sebagai suatu proses strategis yang utuh mulai dari perumusan strategi, implementasi strategi, hingga evaluasi strategi dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Selain itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada identifikasi hambatan pembinaan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kepatuhan administratif ormas, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Kajian mengenai bagaimana pemerintah daerah merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pembinaan dalam menghadapi kompleksitas jumlah ormas, keragaman karakteristik organisasi, serta dinamika sosial-politik daerah masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum tersedianya kajian yang menganalisis strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan secara komprehensif menggunakan perspektif manajemen strategi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi Bakesbangpol Kota Samarinda melalui tahapan perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi dalam pembinaan ormas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan hambatan pembinaan, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana strategi pemerintah daerah dibangun dan dijalankan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan organisasi kemasyarakatan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini juga penting karena permasalahan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan isu yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) secara tunggal. Dinamika ormas yang sangat beragam, jumlah yang terus meningkat, serta variasi tingkat kepatuhan administratif menunjukkan bahwa pengelolaan

ormas membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif dan pengawasan, tetapi juga edukatif, persuasif, dan kolaboratif. Sebagian besar permasalahan yang muncul di lapangan, seperti rendahnya kepatuhan pelaporan kegiatan, belum terdaftarnya ormas secara resmi, hingga potensi keterlibatan ormas dalam konflik sosial dan tindakan premanisme, menunjukkan bahwa pembinaan ormas berkaitan erat dengan faktor sosial, politik, dan kelembagaan yang lebih luas. Oleh karena itu, keberhasilan Bakesbangpol dalam menjalankan fungsi pembinaan sangat bergantung pada efektivitas strategi yang digunakan, kapasitas kelembagaan, serta dukungan koordinasi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Secara keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola organisasi kemasyarakatan dan strategi pembinaan kelembagaan pemerintah daerah. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai peran Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial-politik di tingkat lokal, yang selama ini masih relatif terbatas dan lebih banyak berfokus pada aspek pengawasan dibandingkan strategi pembinaan secara komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Bakesbangpol, dalam memperkuat strategi pembinaan ormas yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kepatuhan administratif ormas, serta menciptakan stabilitas sosial yang lebih kondusif di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas Bakesbangpol di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek sumber daya manusia, kepatuhan administratif ormas, koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan dukungan regulasi dan anggaran. Meskipun demikian, sebagian daerah telah menunjukkan upaya pembinaan yang cukup aktif melalui sosialisasi, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembentukan tim khusus pembinaan ormas.

Penelitian Pohan dan Djohan (2023) yang berjudul Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi kemasyarakatan pemuda di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil yang relatif serupa, yaitu pengawasan Bakesbangpol terhadap aktivitas ormas pemuda belum optimal. Temuan utama penelitian ini adalah masih rendahnya kesadaran ormas dalam menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. Kondisi ini berdampak pada lemahnya basis data pemerintah dalam melakukan pengendalian aktivitas organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, penelitian Ikhmatus (2025) yang berjudul Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sidoarjo dalam Mendorong Pendidikan Politik bagi Organisasi Masyarakat menunjukkan bahwa Bakesbangpol memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi dan partisipasi politik ormas melalui program pendidikan politik yang terstruktur. Namun, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan intensitas sosialisasi, variasi pemahaman politik di kalangan ormas, serta belum

optimalnya jangkauan program pembinaan. Selanjutnya, penelitian oleh Ramadhan dan Gumilar (2022) yakni Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Ormas di Kabupaten Karawang menemukan bahwa strategi pembinaan ormas dilakukan melalui pendidikan wawasan kebangsaan, pelatihan, serta pemberdayaan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ormas sekaligus mencegah potensi konflik sosial. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa tantangan utama terletak pada kualitas sumber daya manusia serta konsistensi pelaksanaan program pembinaan yang belum berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sementara itu, penelitian oleh Fachrurrozi et al. (2025) yang berjudul Peran Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menangani Konflik Antar Ormas di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa Kesbangpol berperan dalam deteksi dini, observasi, serta mediasi konflik antar organisasi kemasyarakatan. Pendekatan ini dinilai cukup efektif dalam meredam potensi konflik sosial. Akan tetapi, penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor serta pengembangan sistem pencegahan konflik berbasis masyarakat masih sangat diperlukan agar penanganan konflik dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan. Terakhir, penelitian Ramadhan (2024) yang berjudul Pengawasan dan Pembinaan Kesbangpol terhadap Ormas di Kota Tangerang menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme koordinasi lintas instansi serta pembentukan Tim Pengawasan Terpadu. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan tim terpadu mampu memperkuat fungsi kontrol pemerintah terhadap aktivitas ormas, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik antar organisasi.

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan, pengawasan, maupun pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Seluruh penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kepatuhan administratif ormas, dan koordinasi antarinstansi merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas pembinaan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis yang digunakan. Penelitian Pohan dan Djohan (2023) berfokus pada aspek pengawasan ormas pemuda, Ikhmatus (2025) pada pendidikan politik organisasi masyarakat, Fachrurrozi et al. (2025) pada penanganan konflik antarormas, sedangkan Ramadhan dan Gumilar (2022) lebih menekankan program pembinaan dan pemberdayaan. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis keseluruhan proses manajemen strategi pembinaan ormas yang meliputi perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi secara terpadu. Keterbatasan penelitian terdahulu juga terlihat pada belum adanya model analisis yang menghubungkan kondisi internal organisasi pemerintah daerah, dinamika eksternal organisasi kemasyarakatan, serta efektivitas strategi pembinaan dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Selain itu, kajian pada wilayah perkotaan dengan jumlah ormas yang tinggi dan tingkat kompleksitas sosial yang besar masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini adalah memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan melalui pendekatan manajemen strategi David (2011). Penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kapasitas kelembagaan Bakesbangpol, karakteristik ormas, serta efektivitas strategi pembinaan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan Teori Manajemen Strategi David (2011), yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas fungsi pengawasan, penertiban, pemberdayaan, serta implementasi kebijakan Bakesbangpol terhadap ormas secara parsial. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif menggunakan pendekatan manajemen strategi yang sistematis untuk menganalisis bagaimana strategi pembinaan ormas dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam satu kesatuan proses manajerial yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan manajemen strategi sebagai kerangka analisis utama untuk memahami efektivitas pembinaan ormas oleh Bakesbangpol secara lebih terstruktur dan menyeluruh.

Kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) penelitian ini tidak hanya terletak pada perbedaan lokasi penelitian maupun penggunaan teori semata, tetapi pada kontribusi konseptual yang dihasilkan dalam pengembangan strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah daerah. Pertama, penelitian ini menawarkan analisis pembinaan organisasi kemasyarakatan sebagai suatu proses manajemen strategi yang utuh yang terdiri atas perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pendekatan ini berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang masih memandang pembinaan ormas secara parsial melalui perspektif pengawasan, pendidikan politik, pemberdayaan, atau penanganan konflik.

Kedua, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa efektivitas pembinaan organisasi kemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor strategis yang memengaruhi keberhasilan pembinaan ormas di tingkat daerah. Ketiga, penelitian ini mengembangkan model konseptual pembinaan ormas berbasis strategi adaptif (*adaptive strategic development*), yaitu strategi pembinaan yang menyesuaikan kapasitas internal pemerintah daerah dengan dinamika eksternal organisasi kemasyarakatan melalui kolaborasi, pendekatan persuasif, dan evaluasi berkelanjutan.

Model ini memberikan perspektif baru bahwa pembinaan ormas tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas organisasi serta

pemeliharaan stabilitas sosial-politik daerah. Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini adalah memperkaya kajian administrasi publik dan tata kelola organisasi kemasyarakatan melalui pengembangan perspektif strategi pembinaan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam melaksanakan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi pembinaan ormas yang dilakukan oleh Bakesbangpol berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Simangunsong, 2017). Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kota Samarinda Tahun 2021–2026, laporan kegiatan pembinaan ormas, data organisasi kemasyarakatan, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Nurdin & Hartati, 2019). Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak memiliki informasi yang relevan mengenai strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan. Informan dipilih berdasarkan tiga kriteria, yaitu memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembinaan ormas, terlibat secara langsung dalam kegiatan pembinaan, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait objek penelitian. Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, 1 orang Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Samarinda, 2 orang Ketua Organisasi Kemasyarakatan yang aktif mengikuti program pembinaan pemerintah daerah, dan 1 orang masyarakat Kota Samarinda yang pernah berinteraksi dengan aktivitas organisasi kemasyarakatan.

Dalam penelitian ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda ditetapkan sebagai informan kunci (*key informant*) karena memiliki kewenangan strategis dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengendalian pelaksanaan program pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kota Samarinda. Informan kunci dipilih karena menguasai informasi secara menyeluruh mengenai kebijakan, strategi, serta arah pembinaan ormas yang dilakukan oleh Bakesbangpol. Informan utama terdiri atas Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan dua orang Ketua Organisasi Kemasyarakatan. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipilih

karena terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis pembinaan, pendataan, monitoring, dan evaluasi organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung menerima program pembinaan dari Bakesbangpol sehingga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan strategi pembinaan dari perspektif organisasi kemasyarakatan.

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah satu orang masyarakat Kota Samarinda. Informan pendukung dipilih untuk memperoleh informasi tambahan mengenai persepsi masyarakat terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan serta dampak pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kehadiran informan pendukung bertujuan untuk memperkaya data penelitian dan melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diperoleh dari informan kunci dan informan utama. Proses penentuan informan dilakukan secara bertahap. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya dilakukan seleksi berdasarkan tingkat keterlibatan, kewenangan, dan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan informan dihentikan setelah informasi yang diperoleh dianggap mampu menjawab kebutuhan data penelitian serta menunjukkan kesesuaian antar sumber data yang diwawancarai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan. Dokumentasi dilakukan melalui penelaahan dokumen perencanaan, laporan kegiatan, data organisasi kemasyarakatan, serta regulasi yang berkaitan dengan pembinaan ormas. Observasi dilakukan secara non-partisipatif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Kegiatan observasi difokuskan pada proses pelayanan administrasi organisasi kemasyarakatan, mekanisme koordinasi antara Bakesbangpol dengan organisasi kemasyarakatan, aktivitas pembinaan yang dilaksanakan, serta kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan. Hasil observasi digunakan untuk mengonfirmasi data hasil wawancara sekaligus memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan di lapangan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Rahmah et al., 2020). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung mengenai strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan hasil studi dokumentasi. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti melakukan penelusuran kembali kepada informan terkait serta melakukan pengecekan dokumen pendukung hingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai untuk

memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kota Samarinda.

Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Strategi David (2011) yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Penelitian dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilaksanakan selama periode penelitian sesuai jadwal akademik yang telah ditetapkan yakni selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 5-24 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi dalam peningkatan mutu pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Samarinda merupakan rangkaian proses yang mencakup penetapan visi dan misi, analisis faktor eksternal dan internal, perumusan tujuan jangka panjang, serta penentuan strategi pelaksanaan. Seluruh proses ini menjadi dasar penting agar pembinaan Ormas dapat berjalan terarah, efektif, dan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026.

Dari aspek visi dan misi, Bakesbangpol Kota Samarinda memiliki arah yang selaras dengan Pemerintah Kota Samarinda. Visi yang dirumuskan yaitu "Terwujudnya kehidupan bermasyarakat di Kota Samarinda yang aman dan kondusif secara berkesinambungan" menegaskan fokus pada stabilitas sosial, keamanan, serta penguatan wawasan kebangsaan. Visi ini mendukung visi besar Kota Samarinda yakni "Samarinda Maju, Kaltim Maju (Mandiri, Adil, Berjaya, Unggul)". Misi Bakesbangpol mencakup peningkatan koordinasi kamtibmas, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembinaan politik masyarakat yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara demokratis.

Pada aspek peluang dan ancaman eksternal, terdapat peluang penting berupa kerjasama lintas lembaga dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta forum masyarakat seperti FPK, FKUB, dan FKDM. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas pembinaan Ormas melalui pertukaran informasi, deteksi dini konflik, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebangsaan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berlangsung secara rutin dan komunikatif, sehingga memperkuat model *collaborative governance* dalam pengelolaan Ormas di Samarinda. Namun demikian, terdapat ancaman eksternal berupa keberagaman Ormas yang tinggi. Perbedaan ideologi, tingkat pendidikan, dan orientasi organisasi menyebabkan pembinaan tidak dapat dilakukan dengan pola yang seragam. Hal ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial meskipun dalam praktiknya konflik masih berskala kecil dan dapat diselesaikan melalui pendekatan mediasi. Selain itu, potensi keterlibatan Ormas dalam politik praktis juga menjadi tantangan karena dapat mengganggu netralitas organisasi serta stabilitas sosial, terutama pada masa pemilu.

Selanjutnya, dari segi kekuatan dan kelemahan internal, kekuatan utama Bakesbangpol terletak pada struktur organisasi yang sudah jelas, sistematis, dan terbagi ke dalam bidang-bidang

fungsional seperti ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan sosial budaya, serta pembinaan Ormas. Struktur ini memungkinkan koordinasi berjalan lebih terarah dan mendukung pelaksanaan tugas secara administratif. Selain itu, dasar hukum yang kuat, yaitu UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan Perwali Kota Samarinda No. 120 Tahun 2021, menjadi landasan legitimasi dalam setiap aktivitas pembinaan dan pengawasan Ormas. Meskipun demikian, kelemahan internal masih cukup signifikan, terutama pada aspek sumber daya manusia dan anggaran. Jumlah pegawai yang terbatas menyebabkan beban kerja tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah Ormas yang harus dibina. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya intensitas *monitoring*, lambatnya pelayanan, serta belum optimalnya pendampingan lapangan. Keterbatasan anggaran juga membatasi kegiatan seperti sosialisasi massal, pelatihan, dan penguatan kapasitas Ormas. Sebagai bentuk adaptasi, Bakesbangpol mengubah pola pembinaan menjadi lebih fleksibel melalui pendekatan langsung (*door to door*) kepada Ormas.

Dalam jangka panjang, Bakesbangpol menetapkan tujuan strategis berupa penguatan wawasan kebangsaan dan peningkatan pelayanan publik. Tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran strategis yang lebih operasional. Sasaran pertama adalah meningkatnya penguatan dan pemahaman ideologi Pancasila yang mencakup dimensi politik, sosial budaya, agama, dan penanganan potensi konflik sosial. Sasaran ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai kebangsaan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh aspek perilaku sosial masyarakat, termasuk Ormas sebagai aktor strategis di tingkat lokal. Sasaran kedua adalah meningkatnya kinerja dan pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD), yang menekankan pada perbaikan tata kelola kelembagaan, efektivitas koordinasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. Sasaran ini menunjukkan bahwa pembinaan Ormas tidak dapat dipisahkan dari kapasitas institusi dalam memberikan pelayanan yang responsif dan akuntabel.

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, Bakesbangpol menetapkan enam indikator kinerja utama yang masing-masing memiliki sub-indikator operasional. Pertama, persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan, yang diukur melalui sub-indikator tingkat partisipasi pelajar dan masyarakat dalam sosialisasi, tingkat pemahaman terhadap nilai Pancasila, serta kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi paham yang bertentangan dengan NKRI. Kedua, persentase pemahaman pendidikan politik masyarakat, dengan sub-indikator tingkat partisipasi dalam kegiatan pendidikan politik, kemampuan memahami proses demokrasi, serta peningkatan kesadaran partisipasi pemilu secara rasional.

Ketiga, persentase jumlah Ormas yang diberdayakan, dengan sub-indikator berupa jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif dibina, tingkat kepatuhan Ormas terhadap regulasi, serta keterlibatan Ormas dalam program pemerintah daerah. Indikator ini menjadi fokus utama dalam penelitian karena mencerminkan efektivitas langsung pembinaan Ormas. Keempat, persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama, yang diukur melalui sub-indikator intensitas kegiatan pembinaan lintas sektor, keterlibatan Ormas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta kontribusi dalam menjaga harmoni sosial. Kelima, persentase deteksi dini ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan), dengan sub-indikator kecepatan respon laporan konflik, jumlah kasus yang dapat ditangani sejak dini, serta efektivitas koordinasi lintas

lembaga dalam penanganan gangguan. Keenam, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang diukur melalui sub-indikator kepuasan terhadap kecepatan layanan, transparansi prosedur, serta kualitas komunikasi aparatur dengan masyarakat dan Ormas.

Strategi yang diterapkan Bakesbangpol Kota Samarinda pada periode 2021–2026 terdiri dari dua fokus utama. Pertama, peningkatan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi, pembinaan, dan edukasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan Ormas. Strategi ini berfungsi sebagai upaya preventif dalam menjaga stabilitas ideologi di tengah dinamika sosial. Kedua, peningkatan sistem pelayanan publik melalui perbaikan prosedur, penguatan SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan yang lebih cepat dan transparan. Secara keseluruhan, perumusan strategi Bakesbangpol Kota Samarinda telah menunjukkan keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, hingga strategi implementatif. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan internal, terutama SDM dan anggaran. Di sisi lain, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penguat utama dalam menjaga keberhasilan pembinaan Ormas di Kota Samarinda.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembinaan organisasi kemasyarakatan telah dipahami oleh aparatur Bakesbangpol dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Namun demikian, peneliti masih menemukan keterbatasan dalam penerjemahan sasaran strategis ke dalam program pembinaan yang lebih terukur pada tingkat operasional. Temuan ini menunjukkan bahwa proses perumusan strategi telah memenuhi dimensi perumusan strategi menurut David (2011), yaitu penetapan visi, misi, tujuan jangka panjang, serta identifikasi faktor internal dan eksternal organisasi. Akan tetapi, efektivitas perumusan strategi belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga masih terdapat kesenjangan antara perencanaan strategis dan kebutuhan implementasi di lapangan.

3.2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi dalam peningkatan mutu pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Samarinda merupakan tahapan operasional dari Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026 yang menekankan keterpaduan antara kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program. Pada tahap ini, strategi yang telah dirumuskan tidak hanya dijadikan pedoman administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam aktivitas nyata yang mencakup penguatan ideologi kebangsaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengendalian dinamika organisasi kemasyarakatan di daerah.

Pada indikator kebijakan operasional Bakesbangpol bertumpu pada dua arah utama, yaitu Gerakan Revolusi Mental dan peningkatan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, Revolusi Mental tidak hanya bersifat normatif, tetapi dioperasionalkan melalui sosialisasi nilai kebangsaan kepada masyarakat dan ormas. Kegiatan ini mencakup dialog kebangsaan, edukasi Pancasila, serta pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Sub-indikator yang terlihat dari implementasi ini adalah meningkatnya pemahaman ideologi Pancasila, penguatan sikap toleransi, serta kemampuan masyarakat dalam mereduksi potensi konflik sosial berbasis

identitas. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan ormas tidak hanya diarahkan pada aspek administratif, tetapi juga pada transformasi nilai dan perilaku sosial. Pada sisi lain, peningkatan pelayanan publik menjadi indikator penting dalam implementasi strategi Bakesbangpol. Layanan seperti rekomendasi ormas, izin penelitian, izin keramaian, hingga fasilitasi organisasi politik menunjukkan bahwa fungsi Bakesbangpol tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator. Sub-indikator dalam aspek ini meliputi kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, serta tingkat kepuasan pengguna layanan. Walaupun sistem pelayanan telah berjalan, keterbatasan SDM dan anggaran masih menjadi faktor yang memengaruhi konsistensi kualitas layanan, terutama dalam hal kecepatan respon dan jangkauan pelayanan kepada seluruh ormas di Kota Samarinda.

Selanjutnya, indikator motivasi pegawai, implementasi strategi ditunjukkan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis tugas dan fungsi. Dalam P-Renstra, Bakesbangpol menargetkan sekitar 20 pegawai per tahun untuk mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Sub-indikator yang muncul dari program ini adalah peningkatan kompetensi teknis aparatur, pemahaman regulasi ormas, serta kemampuan analisis kebijakan. Namun demikian, efektivitas program ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah pegawai yang hanya sekitar 78 orang, di mana sebagian besar harus menangani berbagai bidang sekaligus seperti ormas, FKUB, FKDM, dan ketahanan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja tidak sebanding dengan jumlah SDM yang tersedia, sehingga motivasi dan efektivitas kerja sangat bergantung pada optimalisasi pelatihan yang ada.

Terakhir, indikator distribusi sumber daya menjadi aspek krusial dalam implementasi strategi. Dari sisi SDM, Bakesbangpol menempatkan pejabat fungsional analis kebijakan pada bidang ketahanan sosial dan ormas untuk memperkuat kapasitas teknis pembinaan. Sub-indikator SDM mencakup tingkat pendidikan, kompetensi aparatur, serta rasio pegawai terhadap beban kerja. Data menunjukkan bahwa dari total pegawai, sebagian telah berpendidikan S1 dan S2, namun jumlahnya masih belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah dan jumlah ormas di Samarinda. Hal ini berdampak pada terbatasnya intensitas *monitoring* dan pembinaan langsung di lapangan. Dari segi anggaran, implementasi strategi pembinaan ormas didukung oleh alokasi sekitar Rp 1,5 miliar dalam periode Renstra 2021–2026. Sub-indikator anggaran meliputi distribusi untuk kegiatan koordinasi, *monitoring*, evaluasi, serta mediasi konflik ormas. Namun dalam pelaksanaannya, capaian kinerja menunjukkan bahwa koordinasi hanya mencapai sekitar 96,73 persen dan *monitoring* evaluasi sekitar 84,73 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa keterbatasan anggaran masih berpengaruh terhadap optimalisasi program, khususnya dalam intensitas pembinaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, dukungan kendaraan dinas operasional dan perlengkapan kantor menjadi faktor penting dalam menunjang mobilitas pembinaan. Sub-indikator sarpras meliputi ketersediaan kendaraan, kelayakan fasilitas kerja, serta dukungan operasional lapangan. Namun keterbatasan sarana ini masih menjadi hambatan dalam menjangkau ormas yang tersebar luas di wilayah Kota Samarinda, sehingga tidak semua kegiatan pembinaan dapat dilakukan secara rutin dan merata.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembinaan masih berorientasi pada sosialisasi dan pemberian informasi mengenai regulasi organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, pembinaan yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan organisasi, seperti pengelolaan administrasi, penyusunan program kerja, dan pengembangan tata kelola organisasi, masih belum dilaksanakan secara intensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi strategi belum sepenuhnya mencapai tujuan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan secara berkelanjutan. Menurut David (2011), implementasi strategi yang efektif harus mampu mengubah tujuan strategis menjadi tindakan operasional yang memberikan dampak nyata terhadap sasaran organisasi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi strategi tidak hanya diukur dari terlaksananya program pembinaan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, implementasi strategi Bakesbangpol Kota Samarinda telah berjalan sesuai arah perencanaan, namun tingkat efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pada tiga aspek utama, yaitu SDM, anggaran, dan sarana prasarana. Meskipun demikian, organisasi tetap menunjukkan kemampuan adaptif, salah satunya melalui perubahan pola pembinaan dari sistem undangan menjadi pendekatan langsung ke ormas. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam implementasi strategi, meskipun masih diperlukan penguatan lebih lanjut agar seluruh indikator dan sub-indikator kinerja dapat tercapai secara optimal dalam periode 2021–2026.

3.3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh Bakesbangpol Kota Samarinda dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, implementasi, dan hasil yang dicapai dalam periode Renstra 2021–2026. Pada tahap ini, evaluasi tidak hanya menilai capaian program secara administratif, tetapi juga menilai efektivitas strategi dalam menghadapi dinamika internal dan eksternal, khususnya dalam pembinaan ormas yang memiliki karakteristik beragam dan kompleks. Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, disusun matriks *SWOT* sebagai instrumen evaluasi untuk melihat posisi strategis Bakesbangpol Kota Samarinda sebagaimana disajikan pada Gambar dibawah ini.

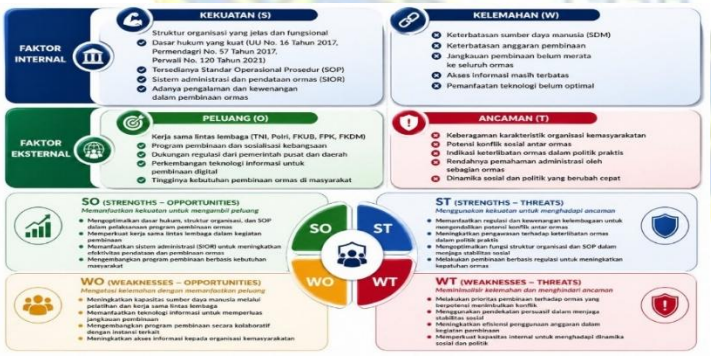

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Gambar 1

Matriks *SWOT* Strategi Bakesbangpol Kota Samarinda dalam Pembinaan Ormas

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara internal, Bakesbangpol memiliki kekuatan yang relatif stabil pada aspek kelembagaan, seperti struktur organisasi yang jelas, dasar hukum yang kuat, serta keberadaan SOP yang menjadi pedoman kerja. Kekuatan ini memberikan legitimasi formal yang kuat dalam pelaksanaan tugas pembinaan ormas. Namun demikian, kekuatan tersebut masih bersifat normatif dan administratif, sehingga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kapasitas operasional di lapangan. Kelemahan internal yang paling menonjol terlihat pada keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana yang belum optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada jangkauan pembinaan yang belum merata serta intensitas *monitoring* dan evaluasi yang masih terbatas. Dari sisi eksternal, terdapat peluang berupa kerja sama lintas lembaga seperti TNI, Polri, serta forum-forum masyarakat (FPK, FKUB, dan FKDM) yang dapat memperkuat efektivitas pembinaan. Namun di sisi lain, terdapat ancaman berupa keberagaman ormas, potensi konflik sosial, serta kecenderungan sebagian ormas terlibat dalam politik praktis yang dapat mempengaruhi stabilitas daerah. Dari hasil pemetaan tersebut, strategi pembinaan ormas kemudian dirumuskan ke dalam empat pendekatan, yaitu strategi SO, ST, WO, dan WT.

Strategi SO (*Strengths–Opportunities*) diarahkan pada pemanfaatan kekuatan internal untuk mengoptimalkan peluang eksternal. Dalam hal ini, Bakesbangpol memanfaatkan dasar hukum, struktur organisasi, dan SOP yang telah ada untuk memperkuat kerja sama lintas lembaga dalam pembinaan ormas. Sub-indikator dari strategi ini terlihat dari meningkatnya intensitas koordinasi dengan TNI, Polri, serta forum masyarakat, serta mulai berkembangnya pemanfaatan sistem administrasi dan data seperti SIOR dalam pendataan ormas. Selain itu, peluang digitalisasi juga mulai dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas pembinaan berbasis data. Strategi ST (*Strengths–Threats*) berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Dalam konteks ini, Bakesbangpol menggunakan kewenangan kelembagaan serta SOP sebagai instrumen pengendalian dalam menghadapi potensi konflik antar ormas dan keterlibatan ormas dalam politik praktis. Sub-indikator strategi ini terlihat pada penguatan fungsi *monitoring* dan evaluasi, peningkatan deteksi dini konflik sosial, serta optimalisasi peran mediasi dalam penyelesaian permasalahan ormas. Pendekatan persuasif dan dialogis menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas sosial di Kota Samarinda.

Strategi WO (*Weaknesses–Opportunities*) diarahkan untuk mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Keterbatasan SDM dan anggaran direspons melalui peningkatan kerja sama lintas lembaga serta penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Sub-indikator dalam strategi ini mencakup peningkatan kompetensi pegawai, optimalisasi pelatihan berbasis tugas dan fungsi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pembinaan tanpa harus bergantung penuh pada penambahan personel. Strategi ini menunjukkan adanya upaya adaptif dalam menjawab keterbatasan internal organisasi. Sementara itu, strategi WT (*Weaknesses–Threats*) merupakan strategi defensif yang bertujuan meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman yang ada. Dalam pelaksanaannya, Bakesbangpol melakukan prioritas pembinaan terhadap ormas yang berpotensi menimbulkan konflik serta memperkuat pendekatan preventif melalui komunikasi dan dialog. Sub-indikator strategi ini terlihat pada efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan

koordinasi internal, serta penguatan mekanisme mitigasi risiko konflik sosial. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga direspons melalui perubahan pola pembinaan dari sistem undangan menjadi pendekatan langsung ke lapangan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana berdampak langsung terhadap intensitas pembinaan dan monitoring organisasi kemasyarakatan. Kondisi tersebut memperkuat hasil analisis *SWOT* yang menempatkan faktor internal sebagai tantangan utama dalam optimalisasi strategi pembinaan. Temuan ini sejalan dengan dimensi evaluasi strategi menurut David (2011) yang menekankan pentingnya peninjauan faktor internal dan eksternal, pengukuran kinerja, serta tindakan korektif sebagai dasar perbaikan strategi organisasi.

Berdasarkan hasil analisis *SWOT*, strategi perbaikan yang dapat dilakukan Bakesbangpol Kota Samarinda meliputi: (1) optimalisasi kerja sama dengan TNI, Polri, FKUB, FKDM, dan organisasi masyarakat sebagai implementasi strategi SO; (2) penguatan sistem monitoring dan deteksi dini konflik sosial berbasis data sebagai implementasi strategi ST; (3) peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya sebagai implementasi strategi WO; dan (4) penetapan prioritas pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang memiliki tingkat risiko konflik lebih tinggi sebagai implementasi strategi WT. Dengan demikian, hasil *SWOT* tidak hanya menggambarkan posisi strategis organisasi, tetapi juga menjadi dasar penyusunan strategi perbaikan yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kota Samarinda.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi pembinaan ormas oleh Bakesbangpol Kota Samarinda masih berada dalam kategori adaptif, yaitu menyesuaikan dengan kondisi keterbatasan internal dan dinamika eksternal yang berkembang. Meskipun secara kelembagaan Bakesbangpol memiliki kekuatan yang cukup baik, namun efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi yang lebih proaktif dan berkelanjutan agar pembinaan ormas tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu menciptakan sistem pembinaan yang lebih stabil, terukur, dan berkelanjutan di Kota Samarinda.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Samarinda belum sepenuhnya berjalan optimal, meskipun secara kelembagaan telah memiliki landasan yang kuat. Hal ini terlihat dari hasil analisis pada tiga tahap utama manajemen strategi, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi yang secara umum menunjukkan adanya keselarasan perencanaan, namun masih terdapat kesenjangan dalam aspek pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan tersebut terutama dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung intensitas pembinaan ormas secara berkelanjutan.

Pada tahap perumusan strategi, penelitian ini menemukan bahwa Bakesbangpol Kota Samarinda telah memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang cukup sistematis dan selaras dengan arah pembangunan daerah. Sasaran strategis seperti penguatan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitas pelayanan publik menunjukkan bahwa pembinaan ormas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diarahkan pada transformasi nilai kebangsaan. Namun demikian, beberapa indikator dan sub-indikator masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya terukur secara operasional dalam konteks pembinaan ormas di tingkat implementasi. Selanjutnya pada tahap implementasi strategi, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan melalui dua fokus utama, yaitu Gerakan Revolusi Mental dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam praktiknya, kedua kebijakan tersebut telah diterjemahkan dalam bentuk sosialisasi nilai kebangsaan, pelayanan administrasi ormas, serta peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis. Namun, efektivitas implementasi masih terkendala oleh keterbatasan SDM dan anggaran, yang menyebabkan intensitas pembinaan belum merata dan masih bersifat selektif. Selain itu, pola pembinaan juga menunjukkan adanya penyesuaian dari pendekatan formal menjadi pendekatan langsung (*door to door*), yang mencerminkan upaya adaptif organisasi dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Pada tahap evaluasi strategi, penelitian ini menemukan bahwa hasil analisis *SWOT* menunjukkan posisi strategis Bakesbangpol berada dalam kategori adaptif. Kekuatan utama terletak pada aspek kelembagaan dan regulasi yang kuat, sedangkan kelemahan dominan berada pada aspek operasional, khususnya keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana prasarana. Dari sisi eksternal, peluang kerja sama lintas lembaga cukup besar, namun ancaman berupa keberagaman ormas, potensi konflik sosial, serta keterlibatan ormas dalam politik praktis masih menjadi tantangan serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pembinaan masih lebih banyak bersifat responsif dibandingkan proaktif dan preventif.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pohan dan Djohan (2023) yang menemukan bahwa permasalahan utama dalam pembinaan dan pengawasan ormas adalah keterbatasan sumber daya manusia serta lemahnya sistem *monitoring* akibat rendahnya kepatuhan administratif ormas. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Ramadhan dan Gumilar (2022) yang menegaskan bahwa efektivitas strategi pembinaan sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas aparatur, serta penelitian Fachrurrozi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kondisi internal organisasi dan dinamika sosial menjadi faktor penghambat utama dalam pemberdayaan ormas. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat temuan Ramadhan (2024) yang menekankan pentingnya peran kepemimpinan dan dukungan anggaran dalam meningkatkan efektivitas pembinaan ormas. Dalam konteks yang sama, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Bakesbangpol Kota Samarinda telah memiliki dukungan anggaran dan kebijakan yang cukup jelas dalam Renstra, namun keterbatasan implementasi di lapangan masih menjadi faktor penghambat utama, sehingga capaian kinerja belum optimal.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi teoritis terhadap pengembangan Teori Manajemen Strategi David (2011), khususnya pada konteks organisasi publik yang melaksanakan

fungsi pembinaan organisasi kemasyarakatan. Teori David menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh keterpaduan antara perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga dimensi tersebut tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, terutama sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta jejaring kerja sama lintas lembaga. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat teori David sekaligus menunjukkan bahwa dalam konteks organisasi sektor publik, kapasitas kelembagaan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas siklus manajemen strategi.

Selain memperkuat teori yang ada, penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah cenderung bersifat adaptif. Strategi tidak hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan formal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi menyesuaikan diri terhadap keterbatasan sumber daya dan dinamika lingkungan eksternal. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai penerapan Teori Manajemen Strategi David (2011) dalam sektor pemerintahan daerah, di mana keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada kualitas perencanaan, tetapi juga pada kemampuan organisasi melakukan penyesuaian secara berkelanjutan terhadap perubahan kondisi sosial, politik, dan kelembagaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan organisasi kemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan program pembinaan, tetapi juga oleh kemampuan Bakesbangpol dalam mengintegrasikan proses perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi secara berkelanjutan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pembinaan organisasi kemasyarakatan memerlukan pendekatan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis evaluasi berkelanjutan agar mampu menjawab dinamika organisasi kemasyarakatan serta menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah. Temuan tersebut menjadi kontribusi empiris sekaligus konseptual bagi pengembangan kajian manajemen strategi pada organisasi publik, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah daerah.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan telah dilaksanakan melalui tiga tahapan manajemen strategi, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pada tahap perumusan strategi, Bakesbangpol telah memiliki arah kebijakan yang jelas melalui visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembinaan yang mengacu pada dokumen perencanaan daerah. Pada tahap implementasi, strategi diwujudkan melalui kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, pelayanan administrasi organisasi kemasyarakatan, koordinasi lintas lembaga, serta penguatan kapasitas aparatur. Adapun pada tahap evaluasi, Bakesbangpol telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya didukung oleh sistem evaluasi yang terukur dan berkelanjutan.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan meliputi adanya dasar hukum yang jelas, dukungan kelembagaan Bakesbangpol,

kerja sama lintas lembaga, serta komitmen aparatur dalam melaksanakan pembinaan. Sementara itu, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tingginya keragaman karakteristik organisasi kemasyarakatan yang menjadi objek pembinaan.

Berdasarkan temuan tersebut, efektivitas strategi pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kota Samarinda memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi kerja sama lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sistem evaluasi yang lebih terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembinaan organisasi kemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan pembangunan daerah.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu penelitian yang relatif singkat yakni selama 20 hari saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian mendatang dapat difokuskan pada analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas strategi pembinaan ormas dalam jangka panjang, khususnya terkait dampaknya terhadap tingkat kepatuhan organisasi kemasyarakatan, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta penurunan potensi konflik sosial di daerah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bolleyer, N. (2021). Civil society–Politically engaged or member-serving? A governance perspective. *European Union Politics, 22*(3), 495–520. https://doi.org/10.1177/14651165211000439

Chowdhury, S. R., Wahab, H. A., & Islam, M. R. (2019). The role of faith-based NGOs in social development: Invisible empowerment. *International Social Work, 62*(3), 967–984. https://doi.org/10.1177/0020872818767260

David, F. R. (2011). *Strategic management: Concepts and cases* (13th ed.). Pearson Education.

Dewi, L. K., Kusumastuti, H., & Waskita, B. (2024). Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality, 10*(1), 97–106. https://doi.org/10.56135/jsb.v10i1.159

Djuwita, T. M., & Hermawan, D. (2018). Implementasi kebijakan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, *12*(2), 95-109. https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/331

Enjolras, B. (2009). A governance-structure approach to voluntary organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, *38*(5), 761–783. https://doi.org/10.1177/0899764008320030

Fachrurrozi, M., Hadi, A., & Rifaid. (2025). Peran Kesbangpol dalam menangani konflik antar ormas di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, *2*(3), 253–263. https://doi.org/10.64581/jid.v2i3.69

Ikhmatus, D. (2025). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sidoarjo dalam mendorong pendidikan politik bagi organisasi masyarakat. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8*(1), 49–58. https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v8i1.14137

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Pohan, R. H. T., & Djohan, D. (2023). Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi kemasyarakatan pemuda di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=30722

Rahmah, M., Ekowati, M., Nalien, E. M., Praja, S. J., Saribulan, N., Wulandari, S., & Rahman, H. (2022). *Metodologi penelitian terapan*. CV Sketsa Media.

Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *7*(2), 1461–1471. https://doi.org/10.33087/EKONOMIS.V7I2.1492

Ramadhan, D. R., & Gumilar, G. G. (2022). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan organisasi masyarakat di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6*(2), 361–367. https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.361-367

Ramadhan, S. A. (2024). Pengawasan dan pembinaan Kesbangpol terhadap organisasi masyarakat di Kota Tangerang. *INTEGRAL: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang*, *3*(1), 1-11. https://jurnal.purworejokab.go.id/index.php/integral/article/view/35

Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The role of civil society organizations in promoting social and political change in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *11*(3), 187–206. https://doi.org/10.29333/EJECS/2154

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empiris, dan inovatif*. Alfabeta.

Sénit, C.-A. (2020). Leaving no one behind? The influence of civil society participation on the Sustainable Development Goals. *Environment and Planning C: Politics and Space, 38*(4), 693–712. https://doi.org/10.1177/2399654419884330

Varda, D. M. (2011). A network perspective on state-society synergy to increase community-level social capital. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40*(5), 896–923. https://doi.org/10.1177/0899764010378171